

## KASUS BANSOS

# Masih Menunggu Hasil Audit BPK

KETERANGAN Saksi Zulfadhli dan Usman Jafar dalam pemeriksaan kasus dugaan korupsi dana Bantuan Sosial Komite Olahraga Nasional

◆ Ke Halaman 7 Kolom 5

## Masih Menunggu Hasil Audit BPK

**Sambungan dari halaman 1**

Kalimantan Barat menjadi bahan koordinasi Polda Kalbar dengan Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Kalbar. Karena pemeriksaan tersebut merupakan petunjuk bagi kepoilisan untuk mendapatkan hasil audit dari BPK.

"Hasil pemeriksaan (saksi Zulfadhli dan UJ, red) dalam waktu dekat akan diserahkan ke BPK. Pemeriksaan keduanya merupakan petunjuk saksi ahli dari BPK, yang telah diminta keterangan beberapa waktu lalu. Petunjuknya, ada keterangan saksi yang perlu dilengkapi sebelum diberikannya hasil audit," kata Kabid Humas Polda Kalbar AKBP Mukson Munandar, Kamis (26/1) di Pontianak.

Menurut Mukson, kini pihaknya masih menunggu hasil audit BPK. Audit itu dibutuhkan sebagai alat bukti bagi penyelidikan. Kendati demikian,

kata Mukson, proses pengu-sutan kasus Bansos tetap terus berlanjut. Sambil menanti BPK menyerahkan hasil audit. Karena itu koordinasi terus diupayakan Polda kepada BPK untuk segera mendapatkan hasil audit.

Hingga kini Polda belum menetapkan tersangka tambahan dalam kasus dugaan korupsi dana Bansos KONI kalbar. Meski telah memeriksa dua saksi tambahan, yakni Zulfadhli dan UJ. Dimana keduanya merupakan anggota DPR-RI Dapil Kalbar. Sementara kapasitas mereka yakni sebagai saksi. UJ sendiri adalah Ketua KONI Kalbar ketika dana Bansos dikururkan. Yang kemudian kasusnya mencuat karena hasil temuan BPK-RI Perwakilan Kalbar.

Sejak kali pertama ditangani pada 2009 silam, baru satu tersangka ditetapkan Polda Kalbar dalam kasus dana Bansos KONI. Yakni mantan wakil bendahara KONI Kalbar, Iswanto. Zulfadhli

maupun UJ diperiksa sebagai saksi untuk tersangka yang telah polisi tetapkan. Bahkan pemeriksaan keduanya sempat menunggu waktu lama. Alasan polisi adalah memeriksa saksi dengan status pejabat negara butuh izin Presiden. Sebelum akhirnya mengambil kebijakan diskresi hukum. Memeriksa mengabaikan izin Presiden. Tapi merujuk kepada UU No 27/2009 tentang kedudukan MPR, DPR dan DPD-RI.

Mukson menambahkan SPDP tersangka Iswanto sendiri sudah dikirim Polda Ke Jaksa Penuntut Umum. Hanya saja memang terus dilengkapi berkasnya. Sekaligus memperdalam penyelidikan untuk kasus dugaan korupsi dana Bansos KONI Kalbar. Karena itu, lanjutnya, tidak menutup kemungkinan saksi yang diteliti dimintai keterangan akan kembali dipanggil. Kalau memang dibutuhkan bagi proses penyelidikan. (stm)